

## **Perluas Sasaran Angkatan Kerja Atasi Pengangguran Terbuka, Aktif Beri Pelatihan dan Sertifikasi**



*Sumber gambar :*

*<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/244/2024/09/08/6-SEPT-NICKO-HERLAMBAANG-3248351123.jpeg>*

Dalam empat tahun terakhir, jumlah pengangguran terbuka terus menurun. Ini semua dampak positif dari bermacam upaya dan intervensi program yang terus dilakukan.

**PENAJAM** – Komitmen dalam penanganan pengangguran terbuka, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) telah melakukan percepatan dengan meluaskan sasaran angkatan kerja. Untuk dilatih kompetensi dan keterampilan agar mampu terserap ke dunia kerja.

Hal itu dipaparkan Pj Bupati PPU Makmur Marbun dalam Apresiasi Pejabat Kepala Daerah Tahun 2024. Makmur Marbun berhasil membawa Pemkab PPU meraih penghargaan Kategori Kesejahteraan Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Majalah Tempo Media Group belum lama ini. Menanggapi hal itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU Nicko Herlambang menyampaikan, selain intervensi program terkait dengan masalah kemiskinan ekstrem, dalam paparan finalis, Pj Bupati PPU Makmur Marbun juga menyampaikan indikator terkait pengangguran di PPU.

Menurutnya, persentasi tingkat pengangguran terbuka berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) di Tahun 2021 sebanyak 2,95 persen. “Kemudian menyusut di tahun 2022 menjadi

2,12 persen dan turun kembali di tahun 2023 menjadi 2,07 persen,” kata Nicko saat ditemui, Senin (2/9).

“Hingga Juni 2024, sudah 453 orang yang dilatih dalam 11 jenis pelatihan berbasis kompetensi,” sambungnya.

Alokasi anggaran khusus pelatihan sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja pada tahun 2024 sebesar Rp15 miliar. “Selain itu kita juga kolaborasi dengan menggandeng dunia usaha dan dunia industri dalam kemitraan penempatan tenaga kerja (program pemagangan),” jelasnya.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi pengangguran, Pemkab PPU telah menggelar upaya pelatihan seperti pelatihan bagi 100 orang lulusan SMA dan SMK di PPU untuk dilatih di Politeknik Penerbangan Surabaya dengan latihan praktik di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan.

Lalu pelatihan angkatan berbasis kompetensi ke Balai Pendidikan Vokasi di Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark. Ada juga pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dengan target 475 orang.

Penyerahan santunan bagi keluarga pekerja rentan meninggal dunia dan beasiswa bagi anak yang ditinggalkan hingga pelatihan mesin bubut bagi angkatan kerja di BLKI Balikpapan.

Adapun langkah konkret yang akan dilaksanakan, yaitu memperluas sasaran angkatan kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri terutama dalam menjawab kebutuhan IKN.

Target 500 angkatan kerja (alokasi RAPBD 2025 Rp10 miliar) akan dilatih berbasis kompetensi dan kewirausahaan, peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 15 ribu pekerja di Tahun 2025.

“Penyelenggaraan *job fair* dengan target melibatkan lebih dari 900 perusahaan serta kerja sama dengan Balai Pendidikan Vokasi atau Balai Latihan Kerja dengan berkolaborasi menggunakan pendanaan APBD Kabupaten, provinsi dan APBN,” tutupnya. **(ami/ind)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Perluas Sasaran Angkatan Kerja Atasi Pengangguran Terbuka, Aktif beri Pelatihan dan Sertifikasi, 4/9/2024

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (PP 31/2006), pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat

keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 PP 31/2006 bahwa pelatihan berbasis kompetensi kerja adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
3. Dalam Pasal 3 PP 31/2006 dijelaskan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah:
  - a. berorientasi pada kebutuhan pasar dan pengembangan SDM;
  - b. berbasis pada kompetensi kerja;
  - c. tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat;
  - d. bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan
  - e. diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif